

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam negara demokrasi, pelaporan keuangan yang transparan merupakan sesuatu yang dituntut oleh rakyat kepada pemerintahnya. Pemerintah berkewajiban memberikan laporan keuangan yang transparan kepada rakyat. Pemerintah demokratis harus bertanggungjawab atas integritas, kinerja dan kepengurusan, sehingga pemerintah harus menyediakan informasi yang berguna untuk menaksir akuntabilitas serta membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik pemerintah merupakan instrumen utama untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik (Mardiasmo, 2002:159).

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban perseorangan, suatu kelompok atau suatu organisasi. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, yang diasumsikan harus melaksanakan kewenangan atau pemenuhan tanggungjawab. Oleh karena itu, tugas dan tanggungjawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun eksternal organisasi. Hal ini dipengaruhi oleh ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan (Warsino, 2009).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 menyatakan secara jelas bahwa entitas pelaporan dan entitas akuntansi harus menyelenggarakan sistem akuntansi keuangan daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi serta menyusun laporan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Selain entitas akuntansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki perilaku akuntansi yang terdiri dari bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) (Riska, 2008)

Guna mewujudkan administrasi keuangan yang efektif maka peran PPK SKPD sangatlah vital dengan kata lain kemampuan dan kecakapannya dalam menjalankan fungsi akuntansi sangat menentukan dalam penyusunan dokumen Laporan Keuangan SKPD. Suatu unit kerja yang kemampuan kepegawaiannya kurang baik dari segi pendidikan maupun dari segi keterampilan akan menghasilkan output yang rendah. Di samping itu ada indikasi rendahnya kinerja SKPD dikarenakan rendahnya kualitas SDM dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh PPK SKPD dalam mengimpletasikan peraturan tersebut, serta masih rendahnya komitmen untuk melaksanakan perubahan peraturan tersebut. (Warsino, 2009:6)

Berlakunya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, implementasi paradigma baru yang berorientasi pada prestasi kinerja diterapkan dalam penyusunan APBD, sistem akuntansi dan pengelolaan daerah. Untuk itu maka setiap pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Faktor yang diperlukan untuk menjalankan hal tersebut, yaitu kesiapan sumber daya manusia aparat pemerintah. Sumber daya manusia dan karakter individu aparat pemerintah menunjang kelancaran pengelolaan keuangan daerah. Salah satu faktor yang masih harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah daerah adalah menyangkut etika dan sikap positif PPK di daerah (Warsino, 2009).

Faktor-faktor individu yang mempengaruhi PPK dalam menyusun laporan keuangan adalah lama pengalaman kerja, gaya kepemimpinan, jenis kelamin yang masih membutuhkan pengujian empiris yang lebih lanjut dalam rangka melanjutkan perluasan pengetahuan mengenai bagaimana variabel-variabel ini mempengaruhi perilaku etis (Warsino, 2009). Gaya kepemimpinan dengan pendekatan kontijensi yang sering digunakan dalam penelitian-penelitian akuntansi salah satu diantaranya yaitu model kepemimpinannya. *Locus of control* yang dimiliki oleh setiap individu akan mempengaruhi perbedaan dalam penilaian terhadap situasi yang sedang dihadapi dan juga akan mempengaruhi perbedaan dalam sikap dan tingkah laku individu dalam lingkungannya, baik lingkungan

fisik atau lingkungan social termasuk lingkungan kerja dari individu tersebut. (Nugrahaningsih, 2005)

Cost and benefit merupakan keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kaulatif. Namun demikian evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Sektor publik bertanggungjawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat. *Misstate* dan ketepatan waktu juga merupakan salah satu dari faktor individu yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan SKPD dimana kesalahan pencatatan terjadi dikarenakan kesengajaan atau ketidaksengajaan seseorang. Ketepatan waktu laporan keuangan sangat penting bagi tingkat kemanfaatan laporan itu sendiri, oleh karena itu dalam menyusun laporan SKPD dapat memperhitungkan ketepatan waktunya (Yulianti, 2005)

Laporan Keuangan di kabupaten Situbondo, mendapat perhatian tersendiri dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Pemerintah kabupaten Situbondo merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang mendapat catatan tidak wajar. BPK memberikan opini tidak wajar dalam pemeriksaan semester pertama tahun 2009 atas keuangan pemerintah Situbondo. BPK memberikan kategori laporan tidak wajar atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Situbondo, dikarenakan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar artinya tidak sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SKPN yang sangat berpotensi terjadinya penyimpangan. Sehingga pencatatannya tidak sesuai dengan SAP dan bukti-bukti

transaksinya tidak ada atau hilang. Oleh karena itu Kantor Sekretariat Daerah Situbondo ini dituju sebagai objek penelitian.

Mengingat penelitian ini tentang perilaku etis sudah banyak yang meneliti, maka penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Riska (2008) tentang Analisis Karakteristik Pejabat Penatausahaan Keuangan Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Penulis mengambil obyek di Kabupaten Situbondo karena mengingat kabupaten Situbondo adalah kabupaten satu-satunya yang mempunyai catatan tidak wajar dalam ketidaktepatan dalam penyampaian laporan keuangan. Penulis ingin mengetahui dan menguji seberapa tingkat perbedaan faktor individual yang mempengaruhi etika penyusunan laporan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Apakah terdapat perbedaan antara PPK SKPD *internal locus of control* dan PPK SKPD *external locus of control* terhadap *diclosure, cost and benefit, responsibility, misstate*, dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD?

2. Apakah terdapat perbedaan antara PPK SKPD senior dan PPK SKPD yunior terhadap *disclosure, cost and benefit, responsibility, misstate*, dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD di kabupaten Situbondo?
3. Apakah terdapat perbedaan antara PPK SKPD pria dan PPK SKPD wanita terhadap *disclosure, cost and benefit, responsibility, misstate* dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD?

1.3 Tujuan dalam Penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan bukti empiris mengenai perbedaan antara PPK SKPD dengan *internal locus of control* dan PPK SKPD dengan *external locus of control* terhadap *disclosure, cost and benefit, responsibility, misstate* dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD.
2. Untuk menemukan bukti empiris mengenai perbedaan antara PPK SKPD senior dan PPK SKPD yunior terhadap *disclosure, cost and benefit, responsibility, misstate* dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD.
3. Untuk menemukan bukti empiris mengenai perbedaan antara PPK SKPD pria dan PPK SKPD wanita terhadap *disclosure, cost and benefit, responsibility, misstate* dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan SKPD.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya dan memotivasi penelitian-penelitian selanjutnya terutama mengenai karakteristik pejabat penatausahaan keuangan terhadap etika penyusunan laporan keuangan SKPD.
2. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi pihak pengelola laporan SKPD agar meningkatkan kinerja mereka.
3. Bagi aparat pemerintah yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk memperluas sumber daya manusia dilingkup pemerintah.
4. Bagi peneliti, dengan adanya temuan dan keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.